

KINERJA KEUANGAN KOTA KEDIRI DITINJAU DARI RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KEMANDIRIAN PRIODE 2016-2019

Vivinia Marcella Sari Dewi¹
Universitas Nusantara PGRI, Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri Jawa Timur
viviniamarcella11@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the City of Kediri in 2016-2019 in terms of 3 regional financial ratios, namely the ratio of effectiveness, efficiency and independence. This study uses a quantitative approach. The research was conducted at the Office of the Regional Financial and Asset Management Revenue Agency Kediri City. Data collection with documentation method. The analytical technique used is descriptive by using the formula for the ratio of effectiveness, efficiency and independence. The results of the analysis show that the financial performance of the City of Kediri seen from the effectiveness ratio is included in the very effective category where the average effectiveness is above 100%, which is 110.76%. The regional financial efficiency ratio is declared inefficient because the average is above 100%, which is 105.44%. The independence ratio is considered low because the independence ratio is 27.04% which is included in a constructive pattern.

Keywords: Regional Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency and Independence

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis bagaimana kinerja keuangan Kota Kediri tahun 2016-2019 yang ditinjau dari 3 jenis rasio keuangan daerah yaitu rasio efektifitas, efisiensi dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif dengan menggunakan rumus rasio efektifitas, efisiensi dan kemandirian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Kediri dilihat dari rasio efektifitas termasuk dalam kategori sangat efektif dimana rata-rata efektivitas diatas 100% yaitu sebesar 110,76%. Rasio efisiensi keuangan daerah dinyatakan tidak efisien dikarenakan rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 105,44%. Rasio kemandirian dianggap rendah karena rasio kemandirian sebesar 27,04% yang termasuk dalam pola konstruktif.

Keywords: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kemandirian

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab mengatur roda pemerintahan dalam pembangunan daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat luas. Sebuah daerah bisa bergerak maju dan berkembang apabila daerah tersebut dapat menciptakan roda pemerintahan yang transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. Pemerintah daerah memiliki tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan ini meliputi: pendidikan, keamanan penegakan hukum, kesehatan masyarakat, transportasi umum, infrastruktur dan penyediaan barang kebutuhan publik. Sistem layanan birokrasi berubah menjadi pembangunan sejak pergantian dari orde baru ke reformasi. Di masa sebelum reformasi, menggunakan sistem yang bersifat sentralistik, akan tetapi sejak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang biasa dikenal dengan era otonomi daerah.

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola kepercayaannya dan tugas pembantuan secara mandiri agar dapat mensejahterakan masyarakat, termasuk kekuasaan untuk mengelola keuangannya sendiri. Pelaksanaan semua kegiatan pemerintah daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun dan disahkan melalui peraturan daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal demi terwujudnya daerah yang mandiri. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengelola dan

meningkatkan pendapatannya sendiri secara optimal dengan cara mengalokasikan dana tersebut pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengoptimalan tersebut harus dimasukan dengan jelas dalam APBD yang merupakan wadah untuk merencanakan berbagai bentuk anggaran baik pemasukan maupun pengeluaran yang terjadi di pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran publik diutamakan untuk keperluan publik, seperti belanja modal.

Analisis rasio keuangan daerah terhadap APBD penting untuk dilaksanakan. Rasio keuangan bisa digunakan untuk mengukur kemampuan pengelolaan keuangan daerah, mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam membelanjakan anggaran daerah dan mengevaluasi seberapa besar keaktifan pemerintah daerah menggunakan pendapatannya, dan melihat sejauh mana perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Baik tidaknya kinerja keuangan daerah bisa dilihat dari hasil analisis rasio keuangan Halim (2012).

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diukur menggunakan cara yaitu realisasi PAD dibandingkan dengan anggaran PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi dari pada anggaran yang ditetapkan berdasarkan kemampuan sesungguhnya suatu daerah Mahmudi (2011).

Rasio efisiensi keuangan daerah merupakan rasio yang mencerminkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio ini, semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan memperhitungkan bahwa pengeluaran yang direalisasikan tepat dengan kegunaannya dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada sektor pelayanan publik merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan tepat dan pengorbanan sekecil mungkin. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal maka pekerjaan tersebut dianggap efisien Mahsun (2013).

Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan keadaan kemandirian suatu daerah yang dihitung dengan besarnya PAD terhadap jumlah keseluruhan pendapatan daerah, sehingga menimbulkan suatu masalah bahwa suatu daerah yang otonom dapat mempertinggi jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio kemandirian juga mencerminkan peran serta rakyat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rakyat membayar pajak dan retribusi daerah akan mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah daerah itu bergantung kepada bantuan pihak eksternal Halim (2012).

Dikutip dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Kediri periode 2016-2019 memiliki beberapa masalah keuangan daerah. Beberapa masalah keuangan daerah yang dihadapi Kota Kediri meliputi: (1) Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi dari pemerintah pusat, hal ini tercermin dari besarnya bantuan pemerintah dari segi APBN, (2) Kapasitas daerah masih rendah jelajahi potensi sumber pendapatan lokal hal ini tercermin dari relatif kecilnya pendapatan yang diperoleh dari PAD daerah dibandingkan dengan transfer pendapatan, (3) Kurangnya usaha serta kemampuan untuk mengelola perpajakan daerah dan mengembangkan sumber pendapatan yang ada, (4) Pemerintah daerah yang tidak efisien melakukan belanja daerah. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai subjek dan objek perkembangan merupakan syarat yang diperlukan untuk selalu melakukan pengawasan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Atas dasar latar belakang diatas untuk tujuan penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Kota Kediri ditinjau dari rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian?

METODE

Penelitian ini menggunakan obyek laporan realisasi anggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian deskriptif, yang memiliki tujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Kediri berdasarkan Kinerja Keuangan.

Teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari catatan atau dokumen yang sudah ada pada kantor BPPKAD Kota Kediri dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria >100% menunjukkan sangat efektif, 100% menunjukkan efektif, 90%-99% menunjukkan cukup efektif, 75%-89% menunjukkan kurang efektif, <75% menunjukkan tidak efektif (Mahmudi, 2011).

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria >100% menunjukkan tidak efisien, 100% menunjukkan efisiensi berimbang, <100% menunjukkan efisien Mahsun (2013:187).

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan mereka, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Rumus rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Dengan kriteria 0% - 25% menunjukkan kemampuan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, 25% - 50% menunjukkan rendah dengan pola hubungan konstruktif, 50% - 75% menunjukkan sedang dengan pola hubungan partisipatif, 75% - 100% menunjukkan tinggi dengan pola hubungan yang delegatif (Halim, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Kediri periode 2016-2019 maka perhitungan rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Anggaran Penerimaan (Rp)	Persentase	Kriteria
2016	238.318.315.508,41	209.506.605.365,43	113,75%	Sangat Efektif
2017	293.065.134.148,36	245.706.760.283,18	119,27%	Sangat Efektif
2018	249.093.229.531,44	241.268.069.987,86	103,24%	Sangat Efektif

2019	266.745.042.377,64	249.757.851.397,53	106,80%	Sangat Efektif
Rata-rata			110,76%	Sangat Efektif

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1 diatas menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Kota Kediri yang sangat efektif, dengan hasil rata-rata 110,76% selama kurun waktu tahun anggaran 2016-2019. Pada tahun 2016 dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan pemerintah Kota Kediri pada tahun 2016-2019 dikategorikan sangat efektif dikarenakan nilai yang diperoleh diatas 100%. Dengan rincian nilai rasio efektivitas tahun 2016 sebesar 113,75%, tahun 2017 sebesar 119,27%, tahun 2018 sebesar 103,24%, tahun 2019 sebesar 106,80%.

2. Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Kediri periode 2016-2019 maka perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2016	1.484.725.405.962,16	1.179.920.839.071,41	125,83%	Tidak Efisien
2017	1.269.944.308.580,97	1.239.131.382.633,36	102,48%	Tidak Efisien
2018	1.237.745.256.862,92	1.278.488.601.890,94	96,81%	Efisien
2019	1.312.905.390.345,00	1.357.998.450.917,82	96,67%	Efisien
Rata-rata			105,44%	Tidak Efisien

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan pemerintah Kota Kediri pada tahun 2016 dan 2017 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya diatas 100%. Jumlah belanjanya yang melebihi jumlah pendapatan daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 efisiensinya tergolong efisien yaitu sebesar 96,81% dan 96,67%. Hal ini dapat disebabkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja daerah.

3. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan data laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Kediri periode 2016-2019 maka perhitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2016	238.318.315.508,41	922.540.893.563,00	25,83%	Konstruktif
2017	293.065.134.148,36	935.968.238.485,00	31,31%	Konstruktif
2018	249.093.229.531,44	978.609.583.937,00	25,45%	Konstruktif
2019	266.745.042.377,64	1.042.645.161.163,00	25,58%	Konstruktif
Rata-rata			27,04%	Konstruktif

Sumber Data: BPPKAD Kota Kediri (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 diatas kemampuan keuangan pemerintah Kota Kediri tergolong masih rendah dengan pola hubungan yang konstruktif dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi

daerah. Dengan rincian nilai rasio kemandirian tahun 2016 sebesar 25,83%, tahun 2017 sebesar 31,31%, tahun 2018 sebesar 25,45%, tahun 2019 sebesar 25,58%.

PEMBAHASAN

1. Rasio Efektivitas

Menurut perhitungan pada Rasio Efektivitas menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Kediri hampir semua selalu menunjukkan kenaikan tiap tahun tetapi tidak pada tahun 2018 terdapat adanya penurunan angka pada anggaran. Pada tahun 2016 PAD dianggarkan dengan nominal Rp 209.506.605.365,43 atau 17,50% dari semua jumlah pendapatan. Pada tahun 2017 anggaran PAD Rp 245.706.760.283,18 atau 20,47% dari jumlah pendapatan. Pada tahun 2018 anggaran PAD diturunkan denominasi Rp 241.268.069.987,86 atau 19,69% dari jumlah pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 anggaran PAD kembali naik menjadi 249.757.851.397,53 atau 19,12% dari jumlah pendapatan.

Realisasi PAD Kota Kediri dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 PAD Kota Kediri sebesar Rp 238.318.315.508,41 atau sebesar 20,19% dari jumlah pendapatan. Pada tahun 2017 PAD yang direalisasikan sebesar Rp 293.065.134.148,36 atau 23,65% dari jumlah pendapatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi PAD yaitu sebesar Rp 249.093.229.531,44 atau 19,48% dari jumlah pendapatan. Kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar Rp 266.745.042.377,64 atau 19,64% dari jumlah pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan BPPKAD Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 113,75%, tahun 2017 sebesar 119,27%, tahun 2018 sebesar 103,24% dan tahun 2019 sebesar 106,80%. Dalam tahun 2016-2019 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektivitas kinerja keuangan BPPKAD sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu sebesar 110,76%. Hal ini dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Kediri juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Kota Kediri sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Kota Kediri harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Kartika & Kusuma (2017) yang dilakukannya penelitian pada Kabupaten Sukabumi menjelaskan bahwasannya hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi jika dilihat dari rasio efektivitas PAD sudah sangat efektif. Dalam penelitian ini di Kabupaten Sukabumi kinerja pengelolaan keuangannya juga sudah sangat efektif. Kedua daerah tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Tetapi demikian, diharapkan setiap daerah tidak selalu terpaku dengan cita-cita yang sudah ditetapkan sebelumnya dan selalu memberikan usaha terbaik terhadap potensi PAD di daerah tersebut, hingga mampu melampaui tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi

Diketahui realisasi pendapatan Kota Kediri dari tahun 2016 sampai 2019 rata-rata menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan Kota Kediri sebesar Rp 1.179.920.839.071,41, tahun 2017 naik menjadi Rp 1.239.131.382.633,36. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 1.278.488.601.890,94. Dan pada tahun 2019 menjadi Rp 1.357.998.450.917,82.

Jumlah realisasi belanja Kota Kediri dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Berawal dari tahun 2016 jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp

1.484.725.405.962,16, lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 1.269.944.308.580,97. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.237.745.256.862,92. Dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan lagi belanja daerah menjadi Rp 1.312.905.390.345,00.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Kediri tahun 2016 sampai dengan 2019 sebesar 105,44% atau dapat dikatakan tidak efisien. Dikarenakan pada tahun 2016 rasio efisiensinya sebesar 125,83%, tahun 2017 sebesar 102,48%, tahun 2018 96,81% dan pada tahun 2019 sebesar 96,67%. Dapat dikatakan kinerja pemerintah Kota Kediri dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah Kota Kediri dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Susanto (2019), dijelaskan bahwa kinerja keuangan Kota Mataram dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah adalah tidak efisien. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Kota Kediri tidak efisien, ini dikarenakan pemerintah Kota Mataram maupun Kota Kediri belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya dan belum mampu menyeimbangkan perolehan belanja daerahnya dengan baik.

3. Rasio Kemandirian

Perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah diketahui ketika realisasi PAD Kota Kediri dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan serta kenaikan, tahun 2016 realisasi PAD Kota Kediri sebesar Rp 238.318.315.508,41, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 293.065.134.148,36, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 249.093.229.531,44 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 266.745.042.377,64.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini adalah bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar Rp 922.540.893.563,00, kemudian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 935.968.238.485,00. Pada tahun 2018 naik sebesar Rp 978.609.583.937,00 dan pada tahun 2019 naik lagi sebesar Rp 1.042.645.161.163,00. Untuk penambahan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat dikarenakan adanya peningkatan terhadap pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Dengan hasil perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kediri tergolong rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan konstruktif di mana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Terjadi penurunan maupun kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Berawal dari tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 25,83%, lalu pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 31,31%. Pada tahun 2018 turun menjadi 25,45% dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 25,58%.

Jadi kemandirian keuangan Kota Kediri secara keseluruhan dapat dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih tinggi. Kota Kediri belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah Kota Kediri sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah Kota Kediri sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan yang dilakukan oleh Akhmad et al., (2019) yang melakukan penelitian di Kabupaten Gowa jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori kurang sekali dan pola hubungan instruktif dimana pemerintah Kabupaten Gowa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan belum bisa untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Kediri dilihat dari rasio efektifitas termasuk dalam kategori sangat efektif dimana rata-rata efektivitas diatas 100% yaitu sebesar 110,76%. Rasio efisiensi keuangan daerah dinyatakan tidak efisien dikarenakan rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 105,44%. Rasio kemandirian dianggap rendah karena rasio kemandirian sebesar 27,04% yang termasuk dalam pola konstruktif.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Akhmad, N. I., Bado, B., & Alam, S. (2019). *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Gowa*. 1–9.
- [2] Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Kartika, D., & Kusuma, I. . (2017). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. 5(9), 1–58.
- [4] Mahmudi. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kedua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [5] Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta.
- [6] Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>